

Abstrak

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk menambah penerimaan pajak dengan cara melakukan penagihan aktif maupun pasif mulai dari penerbitan surat teguran, surat paksa, melaksanakan penyitaan, melakukan pembokliran, melakukan penyanderaan, sampai dengan melakukan lelang barang milik penanggung pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Mojokerto serta hambatan-hambatan yang dialami jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif karena data yang diperoleh adalah data yang berupa angka-angka yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti agar bisa ditarik kesimpulan deskriptif. Data yang digunakan dan diteliti dalam penelitian ini antara lain adalah data tunggakan pajak dari tahun 2018-2020, data penerimaan tunggakan pajak tahun 2018-2020, dan data Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang disampaikan kepada Wajib Pajak dari tahun 2018-2020. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penagihan pajak yaitu penyitaan yang dilakukan KPP Pratama Mojokerto tidak begitu memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut karena tindakan penagihan pajak berupa penyitaan di KPP Pratama Mojokerto tidak banyak dilakukan. Dalam setiap tahunnya dari tahun 2018-2020, KPP Pratama Mojokerto hanya menyita satu buah sepeda motor dengan harga perkiraan Rp3.000.000 - Rp5.000.000.

Kata kunci: Penagihan pajak, penyitaan, tunggakan pajak, pencairan tunggakan pajak

Abstract

Tax is the biggest revenue in Indonesia. Tax collection is one of many ways to increase tax revenue with active or passive tax collection starting from issuing a reprimand letter, forced letter, confiscation, and to do an auction of goods that are belonging to tax payers. This study aims to determine the impact of confiscation to tax arrears disbarment in KPP Pratama Mojokerto and also aims to find out the tax bailiff barriers in doing tax collection action. This study is using a descriptive technique because the data obtained numeric data which is continued by processing data so the researcher can make a descriptive conclusion. The data that are used in this study are tax arrears from 2018 – 2020, tax revenue from tax arrears from 2018 – 2020, and confiscation order (SPMP) that are given to tax payers from 2018 – 2020. The result obtained from this research is tax collection action which is confiscation that is done by KPP Pratama Mojokerto doesn't give that much impact on revenue from tax arrears. It is because the tax collection action in the form of confiscation in KPP Pratama Mojokerto is not done that much. In every year since 2018 to 2020, KPP Pratama Mojokerto only confiscate one motorcycle with estimated price about Rp3.000.000 – Rp5.000.000.

Keywords: tax collection, confiscation, tax arrears, revenue of tax arrears